

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IIGC) merupakan sebuah organisasi independen dan nirlaba, IIGC didirikan pada tanggal 2 juni 2000 atas inisiatif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dan tokoh masyarakat untuk memasyarakatkan konsep, praktik dan manfaat GCG kepada dunia usaha khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. IIGC merupakan salah satu peran dari masyarakat sipil untuk mendorong terciptanya dunia usaha Indonesia yang terpercaya, etis, dan bermartabat.

Visi dari lembaga IIGC adalah menjadi lembaga independen dan bermartabat untuk mendorong terciptanya perilaku bisnis yang sehat. Adapaun misi yang dilakukan berupa :

1. Menyusun dan mengembangkan standar moral yang tinggi sebagai kerangka acuan penciptaan tata kelola perusahaan.
2. Mendorong kepedulian dan kesadaran masyarakat khususnya pelaku bisnis, mengenai pentingnya mengembangkan dan mempertahankan tata kelola perusahaan yang baik.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian menyangkut penerapan praktik bisnis yang sehat dan mengkomunikasikan kepada masyarakat luas.

***Corporate Governance Perception Index* (CGPI)**

Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah pemeringkatanpenerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaanperusahaan

di Indonesia melalui riset yang dirancang untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep *Corporate Governance* (CG) melalui perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dengan melaksanakan evaluasi dan melakukan patokbanding (*benchmarking*). CGPI yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) bekerjasama dengan Majalah SWA merupakan program tahunan sejak 2001 sebagai bentuk penghargaan terhadap inisiatif dan hasil upaya perusahaan dalam mewujudkan bisnis yang etikal dan bermartabat. Sejak tahun 2001 hingga 2011 CGPI telah diikuti oleh perusahaan publik (emiten), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perbankan dan Perusahaan Swasta (BUMS). Kepesertaan CGPI bersifat sukarela dan melibatkan peran aktif perusahaan bersama seluruh *stakeholders* dalam memenuhi tahapan pelaksanaan program CGPI, dan hal tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam memasyarakatkan *good corporate governance*. CGPI mendorong dan menuntut perusahaan peserta untuk melakukan perbaikan atau peningkatan praktik GCG di lingkungannya. Cakupan penilaian dan aspek yang diukur dalam CGPI adalah pengembangan alat ukur yang dimiliki oleh IIGC, pedoman dan prinsip CG yang diterbitkan OECD dan dari berbagai sumber, serta perangkat hukum yang mengatur tentang penerapan prinsip-prinsip *corporate governance*.

Corporate governance melalui penerapan prinsip dasar *transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*, pada riset CGPI dicerminkan dan diukur melalui cakupan penilaian riset dan pemeringkatan sebagai berikut.

Cakupan Penilaian dan Pemeringkatan CGPI

1. Komitmen terhadap tata kelola perusahaan.
2. Transparansi

3. Akuntabilitas
4. Responsibilitas
5. Independensi
6. Keadilan
7. Kompetensi
8. Pernyataan misi perusahaan
9. Kepemimpinan
10. Kolaborasi staf

a) Tahapan Riset dan Pemingkatan CGPI

Tahapan riset dan pemingkatan CGPI dimulai dari pengembangan metodologi dan database sampai dengan penganugerahan CGPI award. Secara lengkap, tahapan riset dan pemingkatan diawali dengan pengembangan metodologi database, publikasi program, konfirmasi peserta CGPI, serta penyebaran dan pengisian kuesioner (*self assesment*). Selanjutnya seluruh peserta CGPI diwajibkan mengikuti tahapan kelengkapan dokumen, penyusunan makalah dan observasi.

Pada tahapan *self-assesment* dilakukan pengisian kuesioner oleh responden dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, baik internal maupun eksternal mengikuti ketentuan dari IIGC. Pada tahapan pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan penelusuran kesesuaian tema CGPI setiap tahunnya dengan mengacu pada daftar dokumen yang dipersyaratkan untuk dikumpulkan ke tim penilai CGPI. Daftar dokumen yang dipersyaratkan dibuat dengan mempertimbangkan dan memperhatikan pemenuhan regulasi, kebijakan, pedoman, dan praktik terbaik dalam penerapan GCG di Indonesia dan negara lain.

Pada tahapan penyusunan makalah, setiap peserta CGPI menyusun makalah dengan sistematika yang telah ditentukan untuk membantu pihak perusahaan memaparkan upaya-upaya yang telah dilakukan berdasarkan

persepsi penerapan konsep *corporate governance* pada perusahaan publik dan BUMN di Indonesia.

Pemeringkatan CGPI disusun berdasarkan kategori tingkat kepercayaan dengan selang nilai yang telah ditetapkan, yaitu terdiri dari 3 kategori :

1. Sangat Terpercaya (85,00 – 100,00)
2. Terpercaya (70,00 – 84,00)
3. Cukup Terpercaya (55,00 – 69,00)

Hasil riset dan pemeringkatan selanjutnya dipublikasikan oleh majalah SWA dan IICG secara nasional dan internasional.

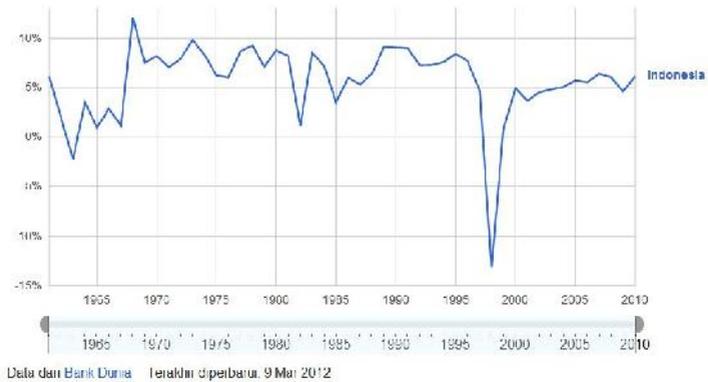
1.2 Latar Belakang

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Pada tahun 1990-an mulai terjadi perubahan besar – besaran dalam bidang sosial politik dan ekonomi baik di eropa maupun asia. Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya diIndonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan yang puncaknya terjadi ketika Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997-1998 yang membuat perekonomian nasional menjadi terpuruk. Pada pertengahan 1998, bursa ditinggalkan oleh hampir seluruh investor asing dan hanya beberapa investor lokal yang bertahan. Sehingga bursa Indonesia mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir pada masa itu. Dan pada saat ini krisis global yang melanda dunia sejak 2008 turut serta mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan dan mengintroduksi konsep *Good Corporate governance* sebagai tata cara kelola perusahaan yang

sehat. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan aktifitas ekonomi yang positif mendekati laju pertumbuhan sebelum krisis ekonomi terjadi. Hal ini terlihat dari tingkat pertumbuhan PDB setelah krisis terjadi, tingkat pertumbuhan PDB di Indonesia cenderung meningkat dibandingkan pada saat krisis terjadi.

GAMBAR 1.1
Tingkat Pertumbuhan PDB Indonesia



Sulit dipungkiri istilah *Good Corporate Governace* mulai populer semenjak terjadinya krisis pada tahun 1998. GCG tak hanya populer tetapi juga mendapat tempat yang terhormat, hal ini dikarenakan 2 keyakinan, yaitu : (1) GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. (2) krisis yang terjadi di Asia dan Amerika latin dilatar belakangi karena gagalnya penerapan GCG. Diantaranya karena sistem regulasi yang lemah, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, perbankan yang lemah, serta pandangan dewan direksi yang kurang peduli terhadap hak-hak para pemegang saham.

Untuk itu pemahaman terhadap visi dan misi perusahaan dalam menerapkan dan menjalankan sistem tata kelola yang baik dari pemerintah

maupun swasta mutlak dibutuhkan demi kelangsungan usaha. Sistem tata kelola perusahaan yang baik tentunya akan menunjang kegiatan tersebut. Hal tersebut menuntut dibangunnya dan dijalankannya konsep dasar *Good Corporate Governance (GCG)* dalam proses manajerial perusahaan.

Di Indonesia penerapan *good corporate governance* sangat membantu dalam mengembangkan perusahaan. Banyak kasus mengenai penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan diakibatkan lemahnya pengawasan terhadap penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan. Seperti yang terjadi pada tahun 2011 dimana terdapat penggelapan dana nasabah Citybank oleh salah satu manajernya. Hal tersebut terjadi dikarenakan lemahnya pengawasan *good corporate governance* dalam bank tersebut yang mengatur hubungan antara pegawai dengan nasabah sehingga terdapat celah. Kurangnya pengawasan mengenai *good corporate governance* menyebabkan terjadinya kurangnya profesionalitas antara hubungan karyawan dan nasabah yang menyebabkan terjadinya penggelapan dana nasabah.

Dalam kasus lain yang terjadi pada tahun 2001 dimana terjadi pengelembungan laba PT. Kimia Farma sebesar 24,7% oleh direksi yang menjabat pada saat itu. Dalam kasus ini direksi yang berwenang melakukan *mark up* laba yang didapat PT. Kimia Farma pada tahun 2001 dengan cara melakukan manipulasi pada catatan persediaan bahan baku dan melakukan pencatatan ganda pada penjualan barang tertentu yang tidak termasuk sampel yang dihitung oleh auditor. Hal ini menyebabkan laba bersih yang dihasilkan PT. Kimia Farma meningkat sekitar 24,7%.

Pada tahun 2007 kasus serupa terjadi pada Bank Lippo dimana terdapat perbedaan laporan hasil audit yang dikeluarkan kepada publik dan audit yang diberikan kepada BEJ. Hal ini mencerminkan lemahnya *good corporate governance* dalam perusahaan tersebut sehingga terjadi kesalahan

fatal dalam penyampaian laporan hasil audit tersebut. Terjadi ketimpangan dan kurangnya koordinasi menyebabkan terjadinya hal tersebut. Hal ini membuat Bank Lippo diberikan peringatan keras oleh BEJ dan pemerintah. Hal-hal tersebut lah yang membuktikan pentingnya peran *good corporate governance* dalam perusahaan. Dimana *good corporate governance* berperan sangat penting untuk mengatur hubungan serta tanggung jawab dan kewajiban seluruh komponen yang terdapat dalam perusahaan.

Ada beberapa prinsip yang dibutuhkan untuk membangun suatu budaya organisasi bisnis yang sehat, yaitu *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian), *Fairness* (kewajaran). Kelima hal tersebut dikenal sebagai prinsip-prinsip dasar GCG.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* tersebut pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Dengan tidak melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* tersebut akan mencerminkan kurang tersedianya informasi untuk melakukan analisis resiko atau hasil investasi yang berlebihan pada sumber daya yang tidak produktif yang pada akhirnya akan menurun atau pudarnya kepercayaan pemodal.

Pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip *good corporate governance* pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan *good corporate governance* sebagai pedoman bagi perusahaan dalam mengelola manajemen perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* saat ini sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, serta agar dapat menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan. *Good corporate governance* diharapkan merupakan sarana untuk menjadikan perusahaan secara lebih baik, antara lain

dengan menghambat praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan pengawasan serta mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan.

Pentingnya penerapan GCG bagi perusahaan untuk menciptakan sebuah nilai bagi para investor dan pemegang saham, karena nilai perusahaan merupakan ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan. Karena laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya yang juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan dimasa yang akan datang.

Tingkat profitabilitas biasanya diukur dari beberap aspek, yaitu berdasarkan ROS (*Return On Sales*), EPS (*Earning per Share*), ROA (*Return On Assets*), dan ROE (*Return On Equity*). Melihat keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam alat ukur tersebut diperlukan alat ukur yang lebih baik dan representatif untuk kepentingan perusahaan maupun pihak luar, yaitu nilai tambah ekonomis (*Economic Value Added*). Alat ukur ini dilandasi pada konsep bahwa dalam pengukuran laba suatu perusahaan kita harus adil dalam mempertimbangkan harapan-harapan penyedia dana.

Economic Value Added (EVA) yang mencoba mengukur nilai tambah (*Value Creation*) yang dihasilkan suatu perusahaan dengan cara mengurangi beban biaya modal (*cost capital*) yang timbul sebagai akibat investasi yang dulakukan. EVA yang positif menandakan perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal karena perusahaan mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang melebihi tingkat biaya modalnya. Sebaliknya EVA yang negatif menunjukkan nilai perusahaan menurun karena tingkat pengembalian lebih rendah dari biaya modal.

Sebelum muncul konsep EVA, tolak ukur yang banyak digunakan oleh para analisis untuk mengukur kinerja suatu perusahaan antara lain adalah arus kas yang dihasilkan dari aktifitas operasi (*operating cash flow*), *earn before extraordinary income*, *residual income*, dan lain sebagainya. EVA didasarkan pada konsep residual income dengan menambahkan adanya penyesuaian akuntansi (*accounting adjustment*). Pengukuran kinerja yang terbaik adalah EVA.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui penerapan *good corporate governance* dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga penulisan skripsi ini memilih judul :

”PENGARUH IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN YANG DIUKUR DENGAN *ECONOMIC VALUE ADDED* (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM 5 BESAR INDEX CGPI)”

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas. Maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara implementasi *Good Corporate governance* dengan kinerja keuangan yang diukur dengan *Economic Value Added (EVA)* ?
2. Seberapa besar pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *economic value added* ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menguji apakah penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara penerapan *Good Corporate Governance* dengan kinerja keuangan yang diukur dengan *Economic Value Added (EVA)* ?

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Aspek teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan mengenai teori GCG. Menjadi sumber informasi dan inspirasi untuk mengembangkan wawasan mengenai peranan *good corporate governance* dalam perusahaan di Indonesia sejalan dengan perkembangan bisnis global. Disamping itu beberapa temuan yang terungkap dalam penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya.

2. Aspek praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan masukan yang kondusif bagi suatu organisasi atau perusahaan yang ingin memajukan organisasi atau perusahaannya dengan melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* guna meningkatkan kinerja perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang objek studi penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka dan Lingkup Penelitian

Bab ini mengemukakan dengan jelas, ringkas, dan padat tentang hasil kajian kepustakaan yang terkait dengan topik dan variabel penelitian untuk dijadikan dasar bagi penyusunan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

Kajian pustaka harus mencakup teori-teori yang sudah baku dalam buku teks, maupun temuan-temuan terbaru yang ditulis dalam jurnal, disertasi, dan skripsi yang terpercaya. Hasil kajian tersebut kemudian digunakan untuk menguraikan kerangka pemikiran.

BAB III : Metode Penelitian.

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang didapat menjawab atau menjelaskan penelitian,

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil dari penelitian dan pembahasan harus diuraikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian. Sistematika pembahasan ini akan lebih tampak jelas luas cakupan, batas dan benang merahnya apabila disajikan dalam sub-sub judul sendiri.

Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dalam bab V disajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian, yang disajikan dalam bentuk kesimpulan penelitian. Ada dua alternatif cara penulisan kesimpulan, yaitu 1) dengan cara butir demi butir atau 2) dengan cara uraian padat.

Saran

Saran dirumuskan secara kongkrit. Saran merupakan implikasi kesimpulan dan berhubungan dengan masalah. Selain menentukan aspek praktis, perumusan rekomendasi juga harus ada yang ditujukan untuk pengembangan ilmu. Implikasi atau rekomendasi dapat ditujukan kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.